

PERAN BOTOH DALAM MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA WATES KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019

Indah Novitasari¹, Fransiskus X. Gian Tue Mali²

^{1,2}Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: novitasari.indah@uki.ac.id; fxgiantue.mali@uki.ac.id

ABSTRACT

The election of village heads is an implementation of democratization at the local level within the framework of village autonomy. The legal basis for the implementation of this village head election is the Village Law Number 6 of 2014. However, the phenomenon of gamblers, or botoh in Javanese, has also made the general election arena a gambling arena. Several studies have shown that botohs become vote buyers, donors, success teams, or just simply gambling. So that in these various roles, botoh is able to influence voter choices so that the candidate he chooses wins the general election, and botoh wins gambling. This study aims to find and describe the role of botoh in the election of the village head of Wates, Kediri Regency in 2019. The research method used was interviews and observations conducted before the election of the village head, and on the election day of the village head of Wates. The research approach used is a qualitative approach, with an exploratory descriptive type of research. The results showed that botoh in the 2019 Wates village head election consolidated and influenced voters during the campaign period until election day. Consolidation is carried out by collecting data, convincing, strengthening beliefs, paying for a number of materials, and providing accommodation during election day. So that botoh becomes a threat to the procedural democratic process in Indonesia, it needs to be eliminated by sharing procedural, legal, and political approaches.

Keywords: The role of botoh, voter behavior, village head election.

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan demokratisasi di tingkat lokal dalam kerangka otonomi desa. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa ini adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Namun, fenomena perjudi, atau dikenal sebagai botoh dalam bahasa Jawa, juga menjadikan arena pemilihan umum sebagai arena perjudian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa botoh menjadi pembeli suara, donatur, tim sukses, atau hanya sekadar berjudi. Dengan berbagai peran ini, botoh mampu mempengaruhi pilihan pemilih sehingga calon yang didukungnya menang dalam pemilihan umum, dan botoh memenangkan perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan peran botoh dalam pemilihan kepala desa di Wates, Kabupaten Kediri tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi yang dilakukan sebelum pemilihan kepala desa dan pada hari pemilihan kepala desa Wates. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa botoh dalam pemilihan kepala desa Wates tahun 2019 melakukan konsolidasi dan mempengaruhi pemilih selama masa kampanye hingga hari pemilihan. Konsolidasi dilakukan dengan mengumpulkan data, meyakinkan, memperkuat keyakinan, membayar sejumlah bahan, dan menyediakan akomodasi selama hari pemilihan. Sehingga, botoh menjadi ancaman bagi proses demokrasi prosedural di Indonesia dan perlu dihilangkan melalui pendekatan prosedural, hukum, dan politik.

Kata kunci: Peran botoh, perilaku pemilih, pemilihan kepala desa.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara demokrasi stabilitas dan pembangunan baik di bidang politik dan ekonomi merupakan tolak ukur penerimaan sebuah negara dalam masyarakat internasional, bahkan menjadi kelayakan sebuah negara untuk mendapatkan peluang kerjasama dan bantuan ekonomi. Salah satu prasyarat penting dalam demokrasi adalah prinsip keterwakilan kekuasaan rakyat kepada pemimpin yang dimanifestasikan dalam pemilihan langsung bagi pemimpin di tingkat pusat hingga local yang dilaksanakan dalam termin waktu tertentu. Besar harapan dengan dilaksanakannya pemilihan secara langsung, maka pemimpin yang terpilih mendapatkan mandate dan legitimasi dari rakyat amanahnya mencapai kesejahteraan umum dan keadilan yang merata bagi rakyat.

Namun demikian demokrasi bukan berarti tanpa masalah, salah satu persoalan umum dalam pelaksanaan pemilihan langsung adalah biaya yang tinggi serta rendahnya tingkat keikutsertaan pemilih (Aspinall, 2019). Rendahnya partisipasi politik ini tidak hanya ada pada pemilihan presiden namun demikian di jajaran pemilihan kepala daerah (tingkat lokal). Rendahnya partisipasi politik menjadi masalah bagi berlangsungnya system demokrasi karena lemahnya faktor input berupa dukungan dan partisipasi yang mendorong terjadinya disfungsi maupun output demokrasi yang bermasalah.

Terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi pemilih. Factor internal umumnya meliputi tingkat Pendidikan, kondisi ekonomi, factor budaya hingga motivasi pemilih. Para pemilih dengan tingkat Pendidikan yang rendah lebih banyak memilih tidak menggunakan hak suaranya (Kolstad and Wig 2016), sedangkan para pemilih dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih banyak berpartisipasi karena jauh lebih memahami isu dalam pemilu. Kelemahan lain terletak dalam motivasi dari pemilih yang cenderung memilih pemimpin karena adanya sejumlah imbalan tertentu atau program yang relative jangka pendek namun memberikan keuntungan besar. Bahkan seringkali pemilih lebih banyak digerakkan karena adanya “motivasi mendapatkan uang” dari para calon, sebagai hal yang lumrah dalam sebuah kontestasi politik. Sedangkan factor eksternal terletak pada adanya praktek *money politics* berupa voters buying, perjudian (botoh) sebagai upaya untuk mendapatkan suara, brokerage dan pola patronase serta klientelisme (Hartati et.al, 2019). Dengan sejumlah kondisi di atas maka partisipasi dari pemilih sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari pemilih dan kondisi eksternal. Partisipasi politik ditentukan melalui perilaku pemilih yang ditentukan oleh faktor internal (individual), budaya, media, status social, usia, Pendidikan, agama, gender, etnisitas dan hasil pemilu.

Salah satu pengaruh eksternal yang mempengaruhi perilaku pemilih adalah pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih baik itu dilakukan oleh tim sukses, relawan, maupun pendukung kandidat, atau kandidat itu sendiri. Pengaruh ini disebut sebagai politik uang. Politik uang dalam pemilu adalah fenomena di mana uang atau materi memainkan peran krusial dalam mempengaruhi atau memanipulasi proses politik dan hasil pemilihan. Fenomena ini mencakup berbagai praktik, termasuk sumbangan kampanye yang besar, pengeluaran politik yang tinggi, dan hubungan yang kompleks antara politikus dan para donor atau kelompok kepentingan. Namun fenomena lain dalam pemilu di Jawa Timur adalah politik uang yang dilakukan oleh para penjudi. Penjudi ini dalam bahasa Jawa disebut sebagai botoh. Botoh seringkali bertaruh sejumlah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

uang diantara mereka, taruhan ini dilakukan dengan memilih salah satu kandidat, bahwa kandidat yang dipilih akan memenangkan pemilu atau meraih suara dengan jumlah tertentu yang disepakati diantara para botoh.

Pertaruhan dalam pemilu ini hakikatnya merupakan kebiasaan masyarakat dalam berjudi seperti sabung ayam, judi kartu atau gablek, atau judi dalam kompetisi tertentu, terutama kompetisi olahraga. Namun dalam perkembangannya perjudian ini berkembang menjadi judi dalam pemilu. Persoalan judi dalam pemilu di negara lain bukanlah hal yang ilegal, bahkan dilegalkan oleh organisasi tertentu, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Iowa Political Stock Market merupakan organisasi yang sejak tahun 1988 secara legal melaksanakan perjudian dalam pemilu, bahkan mereka mempublikasikan analisis prediksi mereka terhadap potensi kemenangan kandidat atau partai politik tertentu. Praktek yang sama terjadi di berbagai negara di Eropa sejak awal abad 20. Namun di Indonesia praktek ini merupakan bentuk perbuatan yang dilarang, baik oleh hukum seperti yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan KUHP (pasal 303), maupun nilai-nilai sosial dan keagamaan. Namun praktek perjudian dalam pemilu di Indonesia yang telah menjadi rahasia umum mayoritas dilakukan secara tertutup oleh masyarakat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga Yogyakarta.

Peran botoh dalam mempengaruhi perilaku pemilih dan mendukung calon kepala desa (cakades) pada Pilkades di Desa Wates. Hal ini karena dalam perilaku perjudian dalam pemilu di Jawa Timur tidak hanya sekedar bertaruh seperti yang terjadi di Amerika Serikat, namun justru mempengaruhi pemilih untuk mendukung pilihan para botoh, sehingga mereka bisa memenangkan pertaruhan. Implikasinya demokrasi yang seharusnya berjalan secara substansial berubah menjadi demokrasi transaksional antara 3 aktor yaitu pemilih, cakades dan botoh, sehingga tetap dapat dikategorikan sebagai politik uang. Namun berbeda dengan politik uang di tempat lain yang dilakukan oleh tim sukses, relawan, atau kandidat dalam pemilu itu sendiri. Pemilu yang hakikatnya bertujuan menentukan pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat berubah menjadi ajang untuk mendapatkan uang baik dari pemilih maupun botoh itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami persepsi individu terhadap lingkungan mereka, dengan fokus pada interpretasi fenomena sosial dalam pengaturan alamiah. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, dokumen, dan observasi, serta memfokuskan pada makna yang diberikan oleh individu terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami fenomena dalam konteks tertentu secara mendalam. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi individu, kelompok, atau fenomena, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik atau memberikan kontribusi terhadap teori yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan pemilihan narasumber berdasarkan keahlian dan peran mereka dalam praktek botoh. Informan kunci dalam penelitian ini termasuk botoh dan pemilih dalam pilkades di Desa Wates. Botoh diwawancarai dengan pseudonim untuk menjaga kerahasiaan, sementara pemilih yang diwawancarai adalah masyarakat yang menerima manfaat ekonomis dari botoh.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pilkades Wates merupakan bagian dari rangkaian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pilkades ini secara serentak diadakan di 254 desa pada tanggal 30 Oktober 2019. Terdapat tiga calon kepala desa di Wates, yaitu Drs. Purnomo, Suparno, dan petahana Darmawan Amril Nurman. Dari total 1.986 pemilih tetap, partisipasi pemilih mencapai 1.963 pemilih, sementara 23 pemilih memilih untuk golput. Hasil akhir menunjukkan bahwa Darmawan Amril Nurman memenangkan Pilkades dengan perolehan suara sebanyak 1.032 suara, diikuti oleh Suparno dengan 919 suara, dan Drs. Purnomo hanya memperoleh 12 suara. Darmawan Amril Nurman merupakan petahana yang telah menjabat sejak tahun 2013.

Dalam pelaksanaan Pilkades Wates, terdapat keterlibatan Botoh yang menjadi bagian menarik untuk diamati. Menurut pengakuan Botoh pertama, sebagian dari mereka berasal dari Blitar dan Tulungagung, dekat dengan Wates, sementara ada yang berasal dari desa dan kecamatan lain di Kabupaten dan Kota Kediri. Botoh tersebut memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dengan bertaruh di beberapa desa karena pelaksanaan Pilkades serentak di 254 Desa di Kabupaten Kediri. Botoh yang bertaruh ada yang berasal dari Wates, kecamatan lain, Kota Kediri hingga daerah lain yang bertetangga dengan Kabupaten Kediri.

Peran Botoh

Pilkades di Indonesia tidak hanya mencerminkan proses demokratis formal, tetapi juga peran berbagai aktor yang memiliki peran krusial dalam mempengaruhi dinamika politik local di desa. Salah satu aktor yang sangat memengaruhi proses Pilkades adalah Botoh, yang berfungsi sebagai penghubung antara pemilih dengan calon kepala desa (cakades) melalui serangkaian upaya sosialisasi, provokasi, dan agitasi. Dalam konteks ini, cakades yang didorong dan didukung oleh Botoh tertentu menjadi "jagoan" yang menjadi taruhan dalam perjudian diantara sesama botoh.

Dalam studi kasus pelaksanaan Pilkades di Wates, botoh secara strategis memilih cakades sebagai objek taruhannya didasarkan pada potensi untuk memenangkan Pilkades. Potensi tersebut seperti hubungan yang kuat dan dekat dengan masyarakat desa, pengalaman mantan pejabat atau tokoh berpengaruh, atau reputasi sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di masyarakat, citra diri yang dinilai layak sebagai pemimpin seperti integritas, berwibawa, dan dinilai mampu melakukan perubahan bagi kemajuan desa.

Berbagai potensi ini dapat dilihat dalam konteks konsep modal politik dalam persaingan kepentingan politik, yang merupakan kerangka kerja teoretis yang menggambarkan berbagai bentuk kapital yang dimiliki individu atau kelompok yang memengaruhi dinamika politik. Menurut Pierre F. Bourdieu, kapital budaya berupa pengetahuan, keahlian, dan citra diri, sementara Max Weber mengidentifikasi kapital politik sebagai kekuatan atau akses yang memungkinkan individu atau kelompok mempengaruhi proses politik. Antonio Gramsci menambahkan bahwa kapital politik dapat digunakan untuk mengendalikan masyarakat melalui institusi budaya, nilai, dan ideologi.

Dalam konteks Pilkades di Wates, potensi yang dimiliki calon kepala desa menjadi modal utama yang dimanfaatkan Botoh untuk membentuk kesadaran pemilih. Kapital budaya seperti pengetahuan, pendidikan, dan koneksi dalam lingkaran elit memainkan peran penting dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

membentuk perilaku pemilih. Pemilih yang memiliki akses yang lebih besar terhadap kapital budaya cenderung lebih mungkin mendukung kandidat yang mewakili atau didukung oleh kepentingan elit atau kelompok berpengaruh.

Botoh yang tujuan sebenarnya adalah mengakumulasi keuntungan ekonomi melalui pilkades Wates, mengidentifikasi berbagai modal politik tersebut. Dengan harapan cakades yang dijadikan sebagai objek taruhan dalam perjudian menang pilkades, sehingga botoh pun mendapatkan keuntungan. Sehingga botoh pada hakikatnya terdiri dari 2 jenis, yaitu botoh besar dengan jumlah uang yang dipertaruhkan besar (jutaan hingga ratusan juta), dan botoh kecil yang bertaruh dengan jumlah uang sedikit (puluhan ribu hingga ratusan ribu).

Setelah memilih cakades sebagai objek taruhan dalam perjudian yang dilakukan, botoh tidak berdiam diri begitu saja menanti hasil pilkades. Namun mereka berupaya mempengaruhi pemilih agar memilih cakades yang didukung. Upaya ini didasarkan karakteristik botoh yang tentu memiliki kekuatan finansial, jejaring sosial dan politik, serta mampu memediasasi pemilih dan cakades. Sehingga dalam pelaksanaan pilkades Wates, setidaknya ada 2 peran botoh, sebagai berikut:

Sebagai voters buyer

Pada masa kampanye, Botoh berperan sebagai agen yang melakukan upaya persuasi, sosialisasi, agitasi, dan memberikan imbalan kepada pemilih. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi hasil pilkades, yaitu kemenangan pada kandidat yang dipilih sebagai objek taruhan. Imbalan seperti uang tunai, dan atau barang botoh buyer berusaha memanfaatkan ketidakpastian dan kebutuhan ekonomi pemilih di Wates untuk memperoleh keuntungan politik. Sehingga mampu memperkuat posisi cakades yang dipilih, membentuk aliansi pendukung, dan bahkan mengeliminasi cakades pesaing dengan mengurangi dukungan yang mereka terima. Upaya ini setidaknya dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Identifikasi. Botoh biasanya mengumpulkan informasi atau memanfaatkan botoh kecil dan orang yang disewa untuk melakukan identifikasi pemilih yang dianggap rentan atau mudah dipengaruhi untuk menerima imbalan dalam bentuk uang tunai, dan barang sebagai imbalan suara mereka. Terutama pada pemilih yang belum memiliki pilihan, atau belum menerima imbalan yang sama dari botoh lain pendukung cakades lain. Namun kelompok masyarakat yang cenderung religius dan menjunjung tinggi etika biasanya menolak imbalan ini. Sementara pemilih paling rentan adalah kelompok usia muda di Wates.
2. Persuasi. Pemilih yang telah teridentifikasi selanjutnya dipengaruhi melalui komunikasi persuasif secara personal atau melalui perantara. Terutama untuk menyetujui dukungan cakades tertentu, sambil menawarkan imbalan. Mereka dapat menggunakan argumen politik, atau memberikan janji palsu untuk mempengaruhi keputusan pemilih.
3. Pemantauan dan penegakan. Upaya pemantauan ini dilakukan melalui pertemuan yang tidak terus menerus namun dilakukan untuk memastikan pemilih yang telah menyepakati tawaran tidak berpindah pilihan atau tidak menerima tawaran yang sama dari botoh lain pendukung cakades lain. Upaya akhir untuk memastikan pemilih yang telah dibeli memilih cakades pilihan botoh adalah mengakomodasi mereka ke tempat pemungutan suara, baik melalui penyediaan uang transportasi yang diistilahkan sebagai *uang bensin*, *uang makan*, atau secara langsung mengantar pemilih menggunakan kendaraan yang disediakan botoh ke tempat pemungutan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

suara di kantor desa Wates.

Dalam praktik tahapan tersebut, *botoh* membentuk tim kerja yang melaksanakan tugas-tugas tersebut atau menggunakan botoh kecil yang memiliki pilihan yang sama. Kondisi ini merupakan contoh nyata dari praktik klientelisme dalam pelaksanaan Pilkades di Indonesia. Menurut definisi konvensional, klientelisme adalah pertukaran *quid pro quo* antara patron politik dan klien, di mana klien memberikan dukungan politik atau suara dalam pertukaran atas manfaat atau imbalan tertentu yang diberikan oleh patron politik. Dalam kasus Pilkades di Wates, imbalan yang diberikan kepada pemilih berupa uang dengan jumlah antara Rp 50.000 untuk akomodasi hingga Rp 200.000 untuk suara yang diberikan, atau janji akan mendapatkan keuntungan tertentu setelah pilkades.

Upaya mempengaruhi pemilih agar menyetujui praktek transaksional tersebut dalam Pilkades Wates dilakukan dengan menyoroti 3 aspek: sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan menekankan kesamaan sosiologis antara cakades dan pemilih, seperti kesamaan agama atau etnis. Pendekatan psikologis berusaha membentuk opini publik tentang kepribadian dan kinerja cakades, sementara pendekatan rasional berfokus pada manfaat material yang dapat diperoleh pemilih dari dukungan mereka terhadap cakades tertentu. Oleh karena itu sebagai voter buyer dan broker dapat disimpulkan beberapa upaya botoh sebagai berikut:

1. Mobilisasi dukungan politik. Botoh menggunakan pengaruh, koneksi, dan wawasan politik mereka untuk menggali dukungan dari berbagai segmen masyarakat, termasuk kelompok agama, masyarakat, dan individu penting dalam desa.
2. Pendukung kandidat. Botoh secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap kandidat tertentu di depan masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk opini masyarakat terhadap kandidat tersebut.
3. Pengatur isu dan agenda. Botoh membantu mengidentifikasi isu-isu relevan bagi masyarakat desa dan mempromosikan agenda-agenda tertentu yang dianggap penting oleh kandidat yang mereka dukung.
4. Distribusi manfaat atau imbalan. Botoh melakukan distribusi manfaat atau imbalan kepada pemilih yang telah menjanjikan dukungan politik, berupa uang tunai, bantuan barang atau jasa, atau janji mendapatkan keuntungan di masa depan jika cakades yang mereka dukung terpilih.
5. Pengorganisasian massa. Botoh yang bertaruh dengan jumlah besar biasanya menandai pemilih yang telah menerima uang atau imbalan lainnya. Pada hari pencoblosan, mereka menyediakan akomodasi kepada pemilih yang telah dibayar, termasuk transportasi, makanan, dan minuman, tergantung pada keyakinan botoh terhadap kemenangan atau penghargaan kepada pemilih yang telah mereka bayar.

Murni Berjudi

Botoh, yang pada dasarnya merupakan penjudi, seringkali memiliki peran yang signifikan dalam dinamika politik lokal, terutama dalam proses pilkades. Praktek perjudian dalam pemilihan kepala desa di Wates tidak hanya melibatkan Botoh dengan modal besar yang mampu membayar pemilih atau mendanai kampanye cakades. Sebaliknya, masyarakat dengan ekonomi rendah pun turut berpartisipasi dalam perjudian ini. Fenomena ini tidaklah mengherankan mengingat bahwa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

praktek perjudian, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi bagian dari budaya dan sejarah masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Timur. Misalnya, aduan sapi di Bondowoso dan karapan sapi di Madura, seringkali dijadikan ajang perjudian oleh penikmatnya. Dalam konteks Pilkades di Wates, jumlah uang yang dipertaruhkan oleh Botoh bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan, ada yang bertaruh hingga mencapai ratusan juta rupiah. Motivasi di balik taruhan ini bisa bermacam-macam, termasuk keyakinan pada cakades pilihan mereka atau sekadar dorongan untuk memenangkan taruhan dimana judi dipandang sebagai sebuah permainan. Pola perjudiannya sebagai berikut:

1. Bertaruh pada Pemenang Pilkades. Botoh membuat kesepakatan pertaruhan dengan Botoh lain, dimana masing-masing memilih cakades berbeda yang dianggap akan memenangkan pemilihan. Mereka memilih satu kandidat dan bertaruh dengan jumlah uang yang disepakati, dengan tujuan mengakumulasi kemenangan. Uang perjudian bisa dipegang sendiri oleh mereka, atau diserahkan pada pihak ketiga sebagai bandar.
2. Membentuk koalisi. Botoh berkoalisi dengan botoh lain untuk memperbesar jumlah uang yang akan dipertaruhkan dengan botoh lain. Jumlah uang yang dipertaruhkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta.
3. Bertaruh pada selisih suara yang didapat cakades. Botoh bertaruh pada jumlah suara yang diraih oleh cakades tertentu, kemenangan ditentukan oleh kesesuaian antara jumlah suara yang dipilih Botoh dan yang diraih oleh cakades dalam pilkades.
4. Bertaruh pada rentang suara tertentu yang didapat. Botoh menebak cakades tertentu akan mendapatkan suara dengan rentang jumlah tertentu, misalnya antara 100-150 suara, sementara botoh lain yang menjadi lawan dalam perjudian menebak dengan rentang jumlah suara berbeda, misalnya hanya 10-50 suara. Kemenangan ditentukan oleh kecocokan dengan jumlah suara yang diraih oleh cakades.

Dalam keseluruhan gambaran diatas, perjudian dalam pemilihan kepala desa bukan hanya tentang taruhan uang, tetapi juga merupakan bagian dari kompleksitas politik lokal. Ini mencerminkan adanya dinamika yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan, baik dari segi ekonomi maupun sosial-budaya, yang turut membentuk hasil dari proses pemilihan tersebut.

Perilaku perjudian yang dilakukan oleh botoh dengan didukung dengan perannya sebagai *voters buyer* untuk memenangkan perjudian diatas hakikatnya dapat dilakukan oleh botoh yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Botoh kecil yang bertaruh dengan jumlah uang yang lebih kecil ada yang berperan sebagai pembantu botoh besar yang memilih cakades yang sama. Agar sama-sama menikmati kemenangan, tidak jarang diantaranya mereka menjadi atau merupakan tim sukses cakades yang dijadikan sebagai objek perjudian. Peran sebagai broker dan voter buyer oleh botoh besar yang berasal dari kalangan menengah keatas dapat terjadi karena kedudukannya yang lebih tinggi dalam struktur sosial. Peran mereka mempengaruhi perilaku pemilih didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Akses finansial. Mereka dapat dengan mudah mendanai kampanye politik, iklan, dan kegiatan lainnya yang memperkuat opini politik tertentu.
2. Pengaruh media massa. Kelas menengah dan atas cenderung memiliki kontrol lebih besar atas media massa, memungkinkan mereka untuk mengontrol narasi politik yang disampaikan kepada masyarakat.
3. Jaringan sosial. Kedudukan sosial yang tinggi seringkali menyertai jaringan sosial yang luas,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

memungkinkan mereka untuk memperoleh dukungan politik dari berbagai kalangan.

4. Akses pendidikan dan informasi. Mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan informasi, memungkinkan mereka untuk membentuk opini politik yang lebih terinformasi.
5. Kendali atas sumber daya ekonomi. Kelas menengah dan atas memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya ekonomi, memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak pada ekonomi.
6. Reputasi dan otoritas. Kedudukan mereka seringkali disertai dengan reputasi dan otoritas yang tinggi dalam masyarakat, membuat pendapat dan dukungan politik yang berasal dari mereka lebih diperhatikan dan dihormati oleh pemilih lainnya.

Botok Sebagai Broker Dan Donatur Calon Kepala Desa Wates

Pilkades pada prakteknya membutuhkan biaya yang besar terutama bagi cakades itu sendiri, kondisi ini disebabkan seolah telah membudaya dalam prosedur demokrasi di Indonesia. Dimana terdapat kecenderungan kandidat untuk membiayai banyak kegiatan, membeli suara pemilih, sementara paradigma pemilih adalah pemilu harus mendapatkan uang dari kandidat atau partai politik. Besaran biaya tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama: tingkat jabatan yang diperebutkan dan jumlah pemilih yang terlibat. Semakin tinggi jabatan yang diperebutkan dan semakin banyak pemilih, semakin besar biaya yang diperlukan. Kandidat perlu mengeluarkan dana untuk kegiatan kampanye, termasuk akomodasi (transportasi, konsumsi, maupun honor tertentu) alat peraga, dan pembiayaan tim sukses. Pada kasus pilkades Wates, kebutuhan akan dana pun terjadi terutama pada masa kampanye. Meski tidak terdapat jumlah pasti, namun para cakades membutuhkan biaya untuk pengeluaran yang sama diatas.

Jumlah pasti dana cakades Wates hingga laporan ini ditulis tidak diketahui, namun jika kita mengestimasi dari DPT yang berjumlah jika setidaknya untuk meraih 50% suara setiap pemilih diberikan uang sejumlah Rp 100.000. Maka 50% dari DPT pilkades Wates, 1.986 orang, maka terdapat 993 orang, total biaya yang dikeluarkan Rp 99.300.000. Jika biaya yang dikeluarkan untuk kampanye, dimana dalam proses kampanye setidaknya ada uang transport (rata-rata Kabupaten Kediri sebesar Rp 50.000) dan uang makan Rp 25.000. Maka Rp 75.000 dikalikan 993 orang, berjumlah Rp 74.475.000 untuk satu kali kegiatan kampanye. Penjumlahan tersebut belum termasuk alat peraga, penguas suara, pemberitaan, dan upah tim sukses. Setidaknya cakades perlu mempersiapkan anggaran minimal Rp 200 juta. Fakta ini dapat diperkuat dengan kasus yang menimpa Kades Wates terpilih Darmawan Amril Nurman yang digugat oleh salah donaturnya bernama Agus Sunyoto, karena melanggar perjanjian pendanaan pada masa pilkades Wates 2013. Agus Sunyoto dalam laporannya ke Polres Kabupaten Kediri mengaku memberikan uang sejumlah Rp 320 juta kepada Darmawan pada saat pilkades 2013 (RadarBangsa, 2020).

Penemuan sumber pembiayaan para cakades Wates secara resmi tidak didapat informasi dari cakades itu sendiri. Namun pengakuan para botok bahwa mereka bisa terlibat sebagai donatur bagi cakades Wates tertentu. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dana yang telah disebutkan. Alasan lain adalah adanya potensi hubungan transaksional dengan kades terpilih, terutama dalam pemanfaatan tanah ganjaran milik pemerintah desa. Seperti diketahui bahwa kades di Kabupaten Kediri tidak mendapatkan gaji namun diberikan tanah ganjaran untuk dikelola sebagai lahan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

pertanian, atau dapat disewakan kepada pihak lain, keuntungannya menjadi ganti gaji kades. Landasan hukumnya terdapat pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa. Kepemilikan tanah di Kabupaten Kediri maupun daerah lain di Jawa Timur tentu menguntungkan, karena tingginya kebutuhan komoditas pertanian yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Seperti beras, jagung, sayur-sayuran, biji-bijian, maupun komoditas hortikultura. Oleh karena itu pertemuan kepentingan botoh dengan cakades terjadi karena kesamaan kepentingan atau kebutuhan, cakades memiliki kepentingan pemilu, sementara botoh membutuhkan kemenangan dalam perjudian. Implikasinya botoh berperan sebagai broker, dan donatur atau sponsor. Meskipun peran broker bisa berubah tergantung konteks, patron-klien dan tujuan.

1. Botoh sebagai broker.

Dalam kepentingan botoh untuk memenangkan perjudian, maka mereka berperan sebagai broker untuk mempengaruhi pemilih. Tujuannya agar pemilih mendukung dan memberikan suara kepada cakades yang dipilih oleh botoh dalam perjudian diantara sesama botoh. Peran botoh dalam mempengaruhi pemilih antara lain:

- a. Botoh berfungsi sebagai perantara antara cakades dan pemilih, menyampaikan pesan, janji, dan program kandidat kepada pemilih. Mereka memastikan bahwa informasi tentang kandidat dan visi-misi mereka sampai ke pemilih dengan cara yang efektif dan meyakinkan. Selain itu, botoh juga bertugas mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memastikan bahwa pemilih yang berada dalam jaringan mereka akan memberikan suara untuk kandidat tertentu. Mereka mengorganisir pertemuan, kampanye, dan acara lainnya yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan bagi kandidat.
- b. Botoh juga mengelola dan mendistribusikan insentif atau "hadiah" kepada pemilih, seperti uang tunai, sembako, atau janji bantuan tertentu setelah pemilu. Peran ini dilakukan oleh botoh tanpa sepengetahuan cakades. Mereka memastikan bahwa kebutuhan logistik, seperti transportasi pemilih ke TPS atau penyediaan fasilitas untuk kegiatan kampanye, terpenuhi. Dengan menggunakan hubungan personal yang mereka miliki, botoh mampu mempengaruhi pemilih. Mereka sering kali adalah tokoh masyarakat atau individu yang dihormati, sehingga kata-kata mereka memiliki bobot yang besar. Dengan menggunakan kearifan lokal dan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial di komunitas mereka, botoh memperkuat jaringan sosial dan memastikan dukungan yang konsisten bagi kandidat.

Mengenai sumber finansial dari anggaran "insentif" yang disalurkan kepada pemilih didominasi oleh uang yang dimiliki botoh itu sendiri. Tentu upaya yang kedua ini hanya dapat dilakukan oleh botoh besar yang bertaruh dengan jumlah uang yang besar. Jika diasumsikan pertarungan antara botoh masing-masing sebesar Rp 20 juta, maka botoh yang memenangkan perjudian akan mendapatkan Rp 20 juta. Jika 50% dari jumlah tersebut yaitu Rp 10 juta digunakan untuk "insentif" kepada pemilih, dan cakades yang didukung memenangkan pilkades, maka botoh tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20 juta, ditambah modal sisa sebesar Rp 10 juta. Dalam perjudian di Pilkades Wates, berkembang isu bahwa terdapat botoh tertentu yang bertaruh mencapai ratusan juta.

- c. Botoh sebagai patron. Dalam pilkades Wates, sebagai patron botoh berperan yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

menyediakan dukungan finansial dan logistik, dengan sepengetahuan cakades, atau anggaran diberikan kepada cakades untuk sepenuhnya digunakan dalam proses pilkades. Praktek ini dapat terjadi ketika botoh sangat yakin dengan kemenangan yang pasti diraih oleh cakades yang dipilih. Namun terdapat hubungan botoh dan cakades yang tidak semata selesai setelah pilkades dilakukan, cakades sebagai klien yang menerima dukungan finansial ini dapat pula terikat untuk memperhatikan kepentingan botoh jika terpilih. Kepentingan ini dapat terjadi seperti pemberian jabatan *kadukuhan*, atau kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian milik desa. Sebagai patron dan klien, hubungan botoh dan cakades didasarkan pada kepercayaan dan ketergantungan, dengan pertukaran manfaat yang saling menguntungkan, di mana botoh mendapatkan keuntungan dari perjudian, dan pengaruh politik, sementara kandidat mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk sukses dalam pilkades.

Implikasi Demokratis

Fenomena *Botoh* dalam pilkades Wates baik sebagai penjudi, broker untuk mempengaruhi pemilih demi kemenangan cakades, maupun sebagai donatur pada hakikatnya salah satu bagian dari fenomena besar tentang politik uang di Indonesia. Politik uang dalam pemilu di Indonesia terdiri dari berbagai macam tipologi; *Pertama*, pembelian suara langsung terjadi ketika kandidat, tim sukses, atau partai politik memberikan imbalan kepada pemilih secara langsung, baik berupa uang, barang, atau bantuan, dengan tujuan mendapatkan suara dalam pemilihan. Biasanya, pemberian uang dilakukan secara diam-diam atau pada masa kampanye sebagai biaya akomodasi, dan seringkali melalui perantara seperti tokoh masyarakat atau pimpinan organisasi. *Kedua*, pembelian suara terselubung terjadi ketika kandidat atau partai politik memberikan imbalan kepada pemilih secara tidak langsung, seperti bantuan sosial, proyek pembangunan, atau fasilitas lainnya, dengan harapan memperoleh dukungan politik dari pemilih. *Ketiga*, mahar kandidat kepada partai politik merupakan pembayaran yang dilakukan oleh kandidat untuk memengaruhi keputusan partai politik dalam menentukan kandidat dalam pemilu dan membentuk koalisi partai politik. *Keempat*, pengaruh korporat terjadi ketika perusahaan atau kelompok kepentingan memberikan sumbangan atau dukungan keuangan kepada kandidat atau partai politik dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau kebijakan yang menguntungkan dari pemerintah yang terpilih. *Kelima*, penggunaan sumber daya negara terjadi ketika pejabat publik atau petahana menggunakan sumber daya negara, seperti anggaran pemerintah atau program bantuan sosial, untuk kepentingan politik pribadi atau partai mereka.

Fenomena ini tentu saja mempengaruhi proses demokratisasi, dimana pemilu dipandang sebagai prosedur demokrasi itu sendiri. Politik uang dapat mengancam integritas proses demokratis dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui terciptanya ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, di mana kandidat atau partai yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar lebih mudah mewujudkan kepentingan politiknya, sementara yang kurang mampu secara finansial terpinggirkan. Hal ini dapat merusak prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Selain itu, politik uang juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik, karena pemilih dapat kehilangan kepercayaan pada proses demokratis yang mereka anggap sudah dimanipulasi oleh kekuatan finansial. Hal ini terkait dengan teori partisipasi politik dan pendekatan demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

dalam pembuatan keputusan politik. Selain itu, dampak politik uang juga meliputi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan mengancam stabilitas demokrasi.

Botoh dalam pilkades Wates hakikatnya terjadi dalam konteks yang sama dengan tipologi politik uang yang disebutkan diatas. Perbedaannya terletak pada perjudian diantara masyarakat yaitu bertaruh siapa kandidat yang akan memenangkan pemilu, atau berapa raihan suara para cakades. Upaya untuk memenangkan perjudian selanjutnya dilakukan dengan cara membeli suara pemilih atau voter buying, atau mendanai cakades yang dipilih selama masa kampanye. Oleh karena itu pilkades yang terlaksana dalam kondisi yang tidak jujur, tidak transparan, tidak bebas, tidak rahasia, dan tidak adil. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan dalam pemilu yang diajukan oleh Robert A. Dahl (Efriza 2015). Pertentangan fenomena *Botoh* dalam pilkades Wates dengan teori poliarki yang diajukan oleh Robert A. Dahl sebagai solusinya untuk demokrasi yang sehat terjadi dalam rumusan dibawah ini:

1. Ketidaksetaraan akses politik. Praktek yang dilakukan *Botoh* sebagai donatur atau *voters buyer* dalam pilkades memperkuat ketidaksetaraan akses politik, dimana cakades yang memiliki dukungan finansial yang besar memiliki keunggulan dalam berkompetisi dalam pilkades Wates. Hal ini dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam representasi politik dan mengurangi makna dasar dari partisipasi politik yaitu kebebasan memilih berdasarkan preferensi kebijakan.
2. Dominasi oligarki politik. Poliarki Dahl mengakui bahwa dalam praktiknya, demokrasi sering kali diwarnai oleh dominasi oleh sekelompok elit politik yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar. Praktik politik uang dapat memperkuat dominasi oligarki politik ini dengan memungkinkan kelompok-kelompok kaya untuk mengendalikan proses politik dan mempengaruhi keputusan politik. *Botoh* yang berperan sebagai broker untuk mempengaruhi perilaku pemilih dan menyepakati hubungan transaksional dengan cakades Wates berimplikasi pada dominasi elit atau kelompok kaya dalam implementasi otonomi dan demokratisasi di tingkat desa.
3. Ketergantungan pada elit. Implikasi dari pertentangan kedua berdampak pada ketergantungan cakades pada *Botoh* kaya untuk mendanai kampanye mereka. Sehingga pilkades yang harusnya diletakkan pada kedaulatan masyarakat desa tidak terwujud, karena cakades lebih mengutamakan dukungan *Botoh* kaya daripada suara rakyat.
4. KKN. Fenomena *Botoh* dalam pilkades Wates juga menimbulkan risiko korupsi dan praktik politik yang tidak etis. Praktik seperti penyuaipan atau penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi dapat merusak integritas proses pilkades dan lemahnya sistem demokrasi di tingkat lokal terutama desa.
5. Disrupsi demokratisasi di tingkat desa. Hubungan yang terjalin antara penjudi atau *Botoh* dengan broker politik dan cakades dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan institusi demokratis. Persepsi bahwa pilkades dipengaruhi oleh kekuatan uang dan kepentingan khusus dapat mengurangi legitimasi pemerintah desa dan melemahkan fondasi demokrasi secara umum.

Fenomena *botoh* dapat terjadi karena melalui perspektif perilaku pemilih rasional, di mana pemilih membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi. Dalam konteks ini, pemilih rasional cenderung memilih opsi yang memberikan manfaat langsung dan nyata, seperti uang atau

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

barang yang ditawarkan oleh botoh, dibandingkan dengan manfaat jangka panjang dari kebijakan politik yang tidak pasti. Manfaat jangka panjang dari kebijakan sering kali sulit diukur dan tidak selalu terealisasi, membuat tawaran botoh menjadi lebih menarik karena memberikan kompensasi langsung dan pasti. Selain itu, dalam situasi di mana informasi tentang kebijakan dan kandidat terbatas atau sulit diakses, pemilih mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh insentif langsung. Mengumpulkan dan menganalisis informasi politik juga membutuhkan waktu dan usaha yang mungkin dianggap terlalu tinggi oleh pemilih, sehingga menerima tawaran botoh dapat mengurangi biaya pengambilan keputusan. Faktor sosial dan lingkungan di mana botoh merupakan praktik yang umum dan diterima juga memainkan peran, karena pemilih rasional mempertimbangkan norma sosial dan tekanan lingkungan. Secara keseluruhan, botoh menawarkan solusi cepat dan konkret bagi pemilih yang mencari manfaat langsung dan menghindari ketidakpastian, sehingga dianggap sebagai pilihan yang rasional dalam banyak konteks.

KESIMPULAN

Peran *Botoh* dalam konteks Pilkadaes di Wates sangat signifikan dalam memengaruhi dinamika politik dan perilaku pemilih. Sebagai penghubung antara pemilih dengan cakades, Botoh memiliki peran strategis dalam mengorganisir dukungan politik, memobilisasi massa, dan memengaruhi opini publik. Dengan kendali atas sumber daya ekonomi, akses terhadap pendidikan dan informasi, serta jaringan sosial yang luas, Botoh dari kelas menengah dan atas memiliki keunggulan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Kebutuhan akan akumulasi keuntungan ekonomi menjadi tujuan Botoh, yang menjadi titik pertemuan antara Botoh dan cakades yang menginginkan jabatan kades. Botoh kaya memiliki orientasi akumulasi kekayaan, sementara Botoh kecil melihat pilkades Wates sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau sebagai permainan semata. Bagi cakades, biaya pilkades yang besar mendorong terjadinya kesepakatan dengan Botoh kaya sebagai donatur dan Botoh kecil sebagai tim sukses untuk mempengaruhi pemilih di Wates. Kemenangan cakades yang didukung berarti kemenangan dalam perjudian, baik bagi Botoh yang bertaruh dengan jumlah uang besar maupun kecil, dengan rentang pertaruhan antara Rp 50.000 hingga Rp 200 juta. Fenomena Botoh dalam pilkades Wates adalah bagian dari masalah politik uang yang meluas di Indonesia, dengan beberapa tipologi politik uang yang terjadi, seperti pembelian suara langsung, pembelian suara terselubung, dan pendanaan tidak resmi pada cakades oleh Botoh sebagai donatur. Fenomena ini mengancam integritas proses demokratisasi dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik, mengurangi partisipasi dan kepercayaan masyarakat, potensi korupsi, dan dominasi elit lokal dalam proses demokratisasi di tingkat desa.

REFERENSI

- Bax, M. (1976). *Harpstrings and Confessions: Machine-style Politics in the Irish Republic*. Amsterdam: Van Gorcum.
- Brierley, Sarah dan Noah L. Nathan. (2021). *The Connections of Party Brokers: Which Brokers Do Parties Select?*. *The Journal of Politics*, 83 (3), 884-901.
- Denzin, N. K. (2009). *Handbook of qualitative research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Efriza dan Yoyoh. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Hartati, A., & all, e. (2019). *Botoh Dalam pilkada : Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh Dalam*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

- Pilkada Kudus 2018. *PolGov*, 1(1), 124.
- Kavanagh, D. (1983). *Political Science and Political Behaviour*. London: Allen and Unwin.
- Kavanagh, D. (1991). Why Political Science Needs History. *Political Studies*, 39(3), 479-495.
- Kavanagh, D. (1992). *Kebudayaan Politik*. Jakarta: 1982.
- RadarBangsa. (2020, Juni 20). *Oknum Kades Wates Kediri Dipolisikan Warganya, Kini Mendekam di Penjara*. Retrieved from www.radarbangsa.co.id: <https://radarbangsa.co.id/oknum-kades-wates-kediri-dipolisikan-warganya-kini-mendekam-di-penjara/>
- Street, J. (1994). Political Culture - From Civic Culture to Mass Culture. *British Journal of Political Science*, 24 (1), 95-113.
- Sturman, J. A. (1997). Case study methods. In J. P. Keeves, *Educational Research, Methodology and Measurement: an International Handbook (2nd ed.)* (pp. 61-66). Oxford: Pergamon.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods (5th ed.)*. California: Thousand Oaks.
- Young, I. M. (2016). Buying, Expropriating, and Stealing Votes. *Annual Review of Political Science*(19), 267-288.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

